



BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pelaksanaan tugas umum pemerintahan menggunakan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan asas efektivitas. Sebagai implementasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Sleman dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

A. Kerjasama Antar Daerah

Kebijakan tentang peningkatan/pengembangan kerjasama diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 195 sampai dengan 198 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kerjasama antar daerah berdasarkan pada pasal 195 ayat (1) bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Kebijakan tentang peningkatan/pengembangan kerjasama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sleman tahun 2005 – 2010. Kebijakan pelaksanaan Kerjasama daerah adalah mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi atas kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai program peningkatan kerjasama yang dilakukan melalui kegiatan:



1. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kabupaten berbatasan
2. Sekretariat Bersama Java Promo
3. Sekretariat Bersama Kartamantul

Kegiatan kerjasama antar daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2005-2009 ini terutama ditekankan untuk menyelesaikan serta mengantisipasi timbulnya masalah dengan daerah/wilayah perbatasan dan daerah tetangga sekitar untuk mengatasi permasalahan seperti batas wilayah/daerah, kerjasama untuk penanganan bidang kesehatan, penanganan bidang keamanan, kerjasama untuk mengatasi masalah-masalah aglomerasi perkotaan seperti persampahan, drainase, jalan, transportasi, air bersih, air limbah, dan sebagainya. Diharapkan dengan terjalannya kerjasama antar daerah dapat meningkatkan fungsi-fungsi umum pemerintahan, akselerasi pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Dari tahun 2005 hingga tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota berbatasan yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Klaten.

Sekber Kartamantul merupakan kerjasama antara 3 daerah di lingkungan Propinsi DIY yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta dalam bidang pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan. Kerjasama tersebut dibentuk dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di wilayah aglomerasi perkotaan.

Kabupaten Sleman juga bekerjasama dengan 13 Kab/kota di lingkungan Propinsi DIY dan Propinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan promosi



pariwisata dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata secara terpadu dengan daerah-daerah tetangga yang tergabung dalam Forum Kerjasama Java Promo dengan anggota Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kota Yogyakarta, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar serta Kabupaten Semarang .

Hasil-hasil kerjasama antar daerah adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kerjasama dan koordinasi antar kabupaten di Kabupaten Sleman dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan di wilayah perbatasan, guna merumuskan kebijakan bersama sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerjasama antar daerah berbatasan yang menghasilkan:

Tabel 5.1. Jumlah Perjanjian Kerjasama Antar Daerah Berbatasan

No	Tahun	Jumlah Perjanjian Kerjasama antar Kepala Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama bidang teknis
1	2005	2	4
2	2006	3	7
3	2007	5	11
4	2008	5	16
5	2009	5	16

Salah satu kerjasama wilayah perbatasan yang menonjol adalah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Kerjasama tersebut terealisasi dalam bentuk pembangunan Embung yang berlokasi di Dusun Kalinongko Lor, Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan dan Dusun Kayoman, Desa Serut, Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Tujuan pembangunan embung tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air baku bagi masyarakat wilayah perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul,



karena selama ini masyarakat di wilayah tersebut mengalami kekurangan air bersih.

Pelaksanaan pembangunan Embung Serut dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

- a. Tahun 2008 merupakan tahapan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED), UKL-UPL, oleh Balai Besar Wilayah Sungai serayu Opak, pembentukan organisasi pengelola Embung Serut.
- b. Tahun 2009 penyediaan lahan oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul
- c. Tahun 2010 – 2011 tahap pembangunan konstruksi embung dan pendanaan menjadi kewajiban Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

Pembangunan konstruksi bangunan Embung Serut akan dimulai pada tahun 2010, dan direncanakan akan selesai sesuai jadwal pada tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pembebasan lahan dalam rangka menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan Embung tersebut. Lahan di wilayah Kabupaten Sleman yang dibebaskan seluas 4.196,48 m² (25% dari total luas tanah Embung Serut 16.609 m²). Sedangkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyediakan lahan lokasi pembangunan embung seluas 8.004,68 m².

2. Kerjasama Kartamantul

Bidang yang telah dikerjasamakan selama tahun 2005 - 2009 meliputi:

- a. Menyusun sistem pengawasan sambungan, perluasan jaringan, pemasaran sambungan rumah, penyusunan SIM Air limbah, Studi Pemanfaatan *sludge*, koordinasi perencanaan Pembangunan Jaringan, Penertiban Pembuangan limbah cair (untuk sistem terpusat); Pengembangan IPAL komunal di wilayah padat, sosialisasi teknis IPAL Komunal, sosialisasi IPAL Komunal, monitoring dan pengawasan



pembangunan IPAL Komunal (untuk sistem komunal); pengendalian pencemaran, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan (tahun 2005).

- b. Identifikasi potensi dan peluang kerjasama angkutan perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman. Untuk jangka pendek difokuskan pada legalisasi dan formalisasi angkutan perbatasan yang ditetapkan dengan jangka waktu, standar kendaraan dan kuota yang jelas dan mencerminkan realitas kebutuhan. Sedangkan untuk jangka panjang difokuskan pada mengembangkan jaringan trayek alternatif angkutan pedesaan.
- c. Pengkajian dan kesepakatan komitmen tentang kebijakan yang mengatur tentang kewajiban uji emisi bagi sumber yang bergerak (kendaraan pribadi) dan sumber yang tidak bergerak seperti pabrik yang bercerobong (2006)
- d. Pengadaan Foto Udara dan peta dasar skala detail kawasan perkotaan Yogyakarta atas bantuan GTZ, Sinkronisasi Penyusunan Rencana Tata Ruang dan RTBL di wilayah perbatasan dan Sinkronisasi Peta (digitasi) untuk Perencanaan Penataan Ruang APY (2009).
- e. Sinkronisasi program dan pemeliharaan/peningkatan jalan APY (untuk ruas-ruas jalan yang dikerjasamakan) meliputi kesepakatan waktu pelaksanaan dan kualitas jalan (mulai 2007-2009).

3. Sekretariat Bersama Java Promo

Bidang yang telah dikerjasamakan selama tahun 2005 - 2009 meliputi:

- a. Studi Pemetaan Wilayah Pengembangan Pariwisata Java Promo (2007)
- b. Penyusunan buku Studi Analisa Potensi Pariwisata Java Promo Hasil kerjasama berupa identifikasi potensi dan permasalahan infrastruktur bagi pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana antar wilayah Kabupaten/Kota dalam lingkup Java Promo serta menggali potensi pengelolaan (institusi) terpadu dalam penanganan (teknis) infrastruktur antar anggota (2008);



- c. Pelatihan Analisa Pasar Wisata Java Promo diikuti oleh peserta perwakilan dari pengelola/perencana terkait pariwisata se kabupaten/kota anggota anggota Java Promo dilaksanakan selama 2 hari (2008)
- d. Penyusunan Studi Indeks Daya Saing Infrastruktur Pendukung Pariwisata Java Promo (2008).
- e. Penyusunan buku Studi Pengembangan Investasi Java Promo (2009).

Anggaran untuk mendukung kegiatan kerjasama dan koordinasi antar kabupaten dari tahun 2005 hingga tahun 2009 sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 5.2. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Kerjasama antar Daerah

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	2005	181.500.000,00	162.373.400,00	89,46
2	2006	141.575.000,00	128.209.350,00	90,56
3	2007	576.219.000,00	576.219.000,00	100
4	2008	265.000.000,00	265.000.000,00	100
5	2009	121.485.550,00	106.406.775,00	87,59

Beberapa permasalahan yang masih dan akan dihadapi dalam kerjasama daerah di masa mendatang antara lain:

- a. Umur teknis TPA Piyungan sebagai tempat pembuangan akan berakhir tahun 2012.
- b. Masih adanya permasalahan di wilayah aglomerasi perkotaan yang perlu ditangani seperti trayek angkutan kota gelap, pembuangan sampah illegal, kurang terkoordinirnya perencanaan tata ruang, drainase, jalan dan jembatan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di masa mendatang perlu dilakukan peningkatan kerjasama daerah perbatasan terutama di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta.



B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga meliputi:

1. Pendampingan *Sustainable Capacity Building For Decentralization* (SCBD)
Mitra Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka Penyelenggaraan *Sustainable Capacity Building For Decentralization* adalah *Asian Development Bank* (ADB) melalui kantor pusat manajemen proyek SCBD di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri. Pelaksananya adalah *provider* dari konsorsium pemenang tender yaitu PT Widya Graha Asana (PT WGA), Jakarta dengan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) UGM dan Center for Economic and Information System Studies (CEISS). Bidang yang dikerjasamakan adalah lintas sektor dalam rangka pengembangan kapasitas pemerintahan daerah yang berkelanjutan untuk desentralisasi yang meliputi kerangka strategi/kebijakan, perkuatan kelembagaan, manajemen SDM dan peningkatan SDM.
2. Peningkatan Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Sumber Daya Air/*Water Resources and Irrigation Sector Project* (WISMP) Kabupaten Sleman. Mitra yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka melaksanakan program *Water Resources and Irrigation Sector Management Project* (WISMP I) adalah Bank Dunia dan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
3. Kerjasama dengan pihak ketiga Lainnya
Kerjasama dilakukan dengan pemerintah pusat, baik departemen maupun lembaga non departemen, lembaga pemerintah lainnya, perusahaan swasta maupun BUMN serta LSM. Kegiatan kerjasama antara lain meliputi bidang teknologi penginderaan jauh, pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan budaya, pemberdayaan masyarakat, sosial, pelayanan kesehatan, permodalan, pendidikan, permukiman, pengelolaan limbah, penanggulangan bencana alam dan penanggulangan kemiskinan, sanitasi lingkungan, pendidikan, serta pelayanan umum.



Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga lainnya sebagaimana table berikut:

Tabel 5.3. Jumlah Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2005-2009

No	Mitra Kerjasama	2005	2006	2007	2008	2009
1	Lembaga Pemerintah	21	28	28	15	33
2	Lembaga Masyarakat	-	2	1	2	6
3	Lembaga Swasta	7	5	15	4	17
	Jumlah	28	35	44	21	57

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2005 – 2009, antara lain:

- a) Tersusunnya kerangka strategi sebanyak 6 dokumen yang meliputi hasil audit kinerja pemerintah daerah, hasil survei kepuasan masyarakat (individu dan bisnis), penyusunan dan sosialisasi sistem kesetaraan dan keadilan gender, kerangka kebijakan *good governance*, sistem dan sosialisasi pemantauan dan pengukuran kegiatan peningkatan kapasitas serta standar pelayanan minimal.
- b) Tersusunnya perkuatan kelembagaan 5 dokumen meliputi pedoman penataan ulang kecamatan sebagai pusat pelayanan, petunjuk teknis penyederhanaan perizinan, detail tugas organisasi perangkat daerah, hand book untuk kepala desa, serta standard monitoring dan evaluasi kelembagaan.
- c) Tersusunnya sistem pengembangan SDM 9 dokumen, meliputi persyaratan pendidikan untuk jabatan di lingkungan pemerintah daerah, pedoman standard kompetensi jabatan struktural, standard kompetensi jabatan fungsional, penerbitan uraian bagi jabatan fungsional dan struktural, pedoman pendidikan dan latihan pegawai, studi kelayakan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan pegawai, pedoman standard penilaian kinerja pegawai, pelaksanaan analisis beban kerja pegawai, standard pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.
- d) Tersusunnya kegiatan penganggaran peningkatan kapasitas daerah sebanyak 2 dokumen yaitu perumusan strategi pendanaan program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan dan identifikasi sumber-sumber pembiayaan bagi peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sleman yang berkelanjutan.



- e) Terlaksananya peningkatan SDM Kabupaten Sleman berupa pendidikan dan pelatihan sebanyak 34 diklat.
- f) Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Perijinan terpadu sebanyak 27 jenis SIM .
- g) Terlaksananya peningkatan SDM Kab. Sleman berupa pendidikan dan pelatihan mulai eselon II, III, IV dan staf sebanyak 27 jenis diklat.
- h) Terbangunnya SIM Perijinan terpadu sebanyak 44 jenis.
- i) Terbangunnya SIM Penanggulangan Kemiskinan .
- j) Tersusunnya pedoman pengelolaan Tanah Kas Desa .
- k) Audit Kinerja Pemkab Sleman .
- l) Survei Kepuasan Pelanggan/masyarakat .
- m) Terlaksananya penandatanganan kesepakatan/MoU antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan berbagai lembaga sebanyak 11 buah, termasuk kerjasama dengan kegiatan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial terutama untuk membantu recovery Kabupaten Sleman Pasca Gempa 27 Mei 2006

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Kerjasama dengan Pihak Ketiga

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	2005	10.000.000,00	9.547.500,00	95,48
2	2006	890.931.000,00	237.543.550,00	26,66
3	2007	1.185.804.670,00	789.269.800,00	66,56
4	2008	1.151.154.000,00	803.207.640,00	69,77
5	2009	1.011.250.000,00	909.880.391,00	89,98

C. Koordinasi dengan instansi vertikal

Kebijakan yang diambil dalam koordinasi dengan instansi vertikal adalah menjalin hubungan kerja seluruh instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah, meningkatkan intensitas koordinasi instansi vertikal di daerah dan



perangkat daerah, dan melibatkan instansi vertikal dalam setiap kegiatan yang terkait.

Forum koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan melalui:

- a) Forum Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), adalah forum yang melibatkan unsur kepala dan wakil kepala dari institusi Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort (Polres), Komando Distrik Militer (Kodim), Pengadilan Negeri, dan DPRD. Forum ini ditujukan untuk koordinasi menyangkut permasalahan-permasalahan daerah bersifat strategis, yang perlu segera mendapatkan kebijakan bersama dan melibatkan unsur pimpinan daerah. Secara prinsip koordinasi tersebut ditujukan untuk menyelaraskan tugas-tugas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan meliputi pembinaan hukum, politik, keamanan ketertiban, sosial kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana.
- b) Forum Komunikasi Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkejakpol) adalah forum yang melibatkan unsur Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort. Forum ini merupakan wahana komunikasi terutama untuk mengatasi permasalahan hukum di wilayah Kabupaten Sleman. Beberapa hal yang dibahas dan menjadi komitmen bersama antara lain adanya komitmen peningkatan komunikasi antar unsur Dilkejakpol dalam hal terjadi permasalahan hukum sehingga setiap unsur dapat mengakses data mengenai masalah hukum yang diperlukan, mendukung program kegiatan yang mengarah pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Sleman yang sering mengalami kendala terkait dengan “prodeo” atau penanganan perkara bagi warga masyarakat miskin dan antisipasi peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Koordinasi dengan instansi vertikal selama tahun 2005-2009, telah dapat meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan antara lain strategi penanganan yang komprehensif terhadap penanganan situasi dan kondisi baik



nasional maupun lokal terkait dengan terorisme, program bersama di tingkat teritorial/kecamatan, gerakan kewaspadaan, mekanisme pelaporan dan koordinasi antar instansi, peningkatan kewaspadaan dan penciptaan kondisi yang kondusif dalam persiapan, saat dan pasca pelaksanaan pemilu, serta peningkatan penanganan penyalahgunaan narkoba.

Alokasi anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal mulai tahun 2005 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.5. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	2005	50.000.000,00	46.393.550,00	92,79 %
2	2006	81.446.000,00	54.596.000,00	67,00%
3	2007	81.446.000,00	54.596.000,00	67,00%
4	2008	223.570.850,00	106.720.850,00	47,73%
5	2009	602.450.000,00	539.782.500,00	89,60%

D. Pembinaan Batas-Batas Wilayah

Kebijakan pembinaan batas-batas wilayah adalah percepatan penegasan batas antar daerah baik antar daerah dalam provinsi maupun antar provinsi sesuai dengan kebijakan Departemen Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/778/PUM tanggal 15 Oktober 2004 Tentang Percepatan Penegasan Batas Wilayah Daerah dan surat Nomor 126/87/SJ tanggal 12 Januari 2005 Perihal Penyelesaian Permasalahan Batas Antar Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan dan menghindari permasalahan dan sengketa batas daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan penanganan wilayah perbatasan melalui penegasan batas daerah di perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul dan



Kabupaten Klaten yang meliputi penelitian dokumen batas daerah, pelacakan batas daerah, pemasangan pilar batas, pengukuran koordinat batas.

Dari berbagai tahapan penegasan batas tersebut dari tahun 2005-2009 Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyelesaikan proses penegasan batas daerah dengan hasil sebagai berikut:

1. Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang telah selesai dengan keluarnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Terkait dengan permasalahan Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di kompleks Rumah Sakit Panti Rapih telah diadakan koordinasi dengan melibatkan Pemerintah Propinsi DIY sebagai fasilitator dan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
Sampai tahun 2006, telah disepakati pembagian retribusi parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan secara proporsional sesuai keluasan wilayah masing-masing. Kepastian hukum tentang batas wilayah antara Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta sudah ada dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman. Berdasarkan ketentuan tersebut sebagian wilayah Rumah Sakit Panti Rapih merupakan wilayah yang secara administratif termasuk Desa Caturtunggal Kecamatan Depok. Tindaklanjut permendagri tersebut dilaksanakan dengan penyesuaian administrasi pertanahan.
3. Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul telah selesai dengan keluarnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman.
4. Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo, sampai akhir tahun 2009 dalam proses finalisasi di Depdagri



dan ditargetkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap pada tahun 2010.

5. Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul dimulai dengan pemasangan pilar batas baik oleh Kabupaten Sleman maupun kabupaten Bantul. Sampai akhir tahun 2009 proses belum final karena adanya permohonan peninjauan kembali wilayah batas Blok Tambakbayan, Tambakkraman dan Blok Santan oleh Kabupaten Bantul (dalam proses penyelesaian oleh Pemerintah Provinsi DIY).

Jumlah Pilar Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan kabupaten/ kota berbatasan sampai tahun 2009 sebagai berikut:

Tabel 5.6. Jumlah Pilar Batas Daerah

No.	Lokasi Perbatasan	Jumlah (buah)
1.	Sleman- Kota Yogyakarta	65
2.	Sleman- Gunungkidul	28
3.	Sleman-Kulonprogo	55
4.	Sleman - Bantul	183
5.	Sleman-Klaten	48
6.	Sleman-Magelang	20
Jumlah Total		379

Dari 297 buah pilar batas daerah yang terpasang tersebut 185 buah dipasang oleh Kabupaten Sleman, sedangkan 112 buah lainnya dipasang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi DIY maupun Pemerintah Provinsi Jateng.

Dalam rangka pemeliharaan pilar batas secara fisik agar tetap berfungsi dengan jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik, telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan pada tahun 2008-2009 sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 5.7. Pemeliharaan Pilar Batas

No.	Tahun	Pemeliharaan Pilar Batas	Lokasi Perbatasan
1.	2008	28	Sleman - Gunungkidul
2.	2009	29	Sleman-Kulonprogo
3.	2009	34	Sleman-Kota Yogyakarta

Hingga tahun 2009 pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan penegasan batas daerah antar kecamatan meliputi batas wilayah kecamatan Mlati, Seyegan dan Sleman dengan ruang lingkup kegiatan penelitian dokumen batas wilayah antar kecamatan, pelacakan titik batas kecamatan, penentuan garis batas sementara, pemasangan 99 pilar batas sementara antar kecamatan, dan penyusunan dokumen batas wilayah antar kecamatan.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pembinaan batas wilayah dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Pembinaan Batas Wilayah

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	2005	109.000.000,00	85.599.000,00	78,53%
2.	2006	111.772.500,00	91.937.500,00	82,25%
3.	2007	122.425.000,00	109.555.000,00	89,49%
4.	2008	138.700.000,00	90.157.950,00	65,00%
5.	2009	130.334.450,00	115.983.850,00	88,99%

Meskipun pelaksanaan pembinaan dan kerjasama wilayah perbatasan telah berjalan optimal, namun sampai tahun 2009 masih terdapat permasalahan perbatasan yaitu pemasalahan batas daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul. Permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul yang terletak di Blok Tambakbayan, Blok Tambakkraman Desa Caturtunggal Kecamatan Depok dan Blok Santan, Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok yang berbatasan dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan adanya permohonan Bupati Bantul kepada Gubernur DIY agar ada peninjauan kembali tentang keberadaan tiga blok tersebut. Dengan fasilitasi dari Pemerintah Propinsi DIY dan DPRD Propinsi DIY pada tahun 2009 telah dilaksanakan koordinasi membahas upaya penyelesaian permasalahan 3 Blok tersebut.



E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana,

Selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2005-2009 Kabupaten Sleman mengalami beberapa bencana baik gempa bumi, erupsi Gunung Merapi maupun tanah longsor dan angin ribut. Secara detail bencana dan perhitungan kerugian yang dialami akibat bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9. Data Bencana Tahun 2005-2009

No	Tahun	Bencana	Kerugian
1	2005	Gempa Bumi	Meninggal : 2 Orang Kerugian : Rp. 6.093.645.000,00
2	2006	Erupsi Gunung Berapi Gempa Bumi Angin Ribut	Meninggal : 4 orang Meninggal: 264 Orang, Luka Berat : 672 Orang, Luka Sedang : 560 Orang, Luka Ringan : 2.539 Kerugian : Rp. 952.155.843.500,00 Luka sedang : 560 Orang, luka Ringan 2539 Orang Dana tersalur : Rp. 604.954.890.00,00
3	2007	Angin Puting Beliung	Angin Ribut kerugian : Rp. 75.300.000,00 Tanah Longsor : Rp. 265.000.000,00 Petir : Rp.4.300.000,00 Dana tersalur : Rp.3.211.850,00
4	2008	Angin Ribut	Meninggal : 1Orang, Luka sedang : 1 orang
5	2009	Angin Ribut Tanah Longsor Kebakaran Kekeringan	Kerugian : Rp.244.100.000,00 Kerugian : Rp. 351.000.000,00 Kerugian : Rp. 107.600.000,00 Kerugian : Rp. 13.300.000,00

Dalam penanganan bencana gempa bumi tahun 2006 telah dilakukan strategi rehabilitasi para korban gempa bumi dengan prioritas pada memfungsikan kembali balai somah, sehingga mampu membangkitkan kembali dinamika kehidupan masyarakat. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dilaksanakan dengan berpedoman pada *blue print* refungsionalisasi aset masyarakat dan aset strategis pemerintah daerah. Refungsionalisasi aset strategis pemerintah daerah diprioritaskan pada aset pemerintah yang berfungsi untuk prasarana publik.

Dalam menghadapi kemungkinan bencana alam diperlukan manajemen penanggulangan bencana alam yang merupakan kegiatan yang berkesimbangan dan tersistem baik pada masa pra bencana, pada saat



bencana maupun pada masa pasca bencana. Kegiatan tersebut diawali dengan perencanaan kawasan rawan bencana, pembangunan sarana prasarana, sehingga pada saat bencana sistem penanggulangan dapat diaktifkan dan diakhiri dengan tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.

Berbagai langkah yang telah diambil dalam rangka pengurangan resiko bencana dari tahun 2005 sampai tahun 2009, khususnya penyediaan sarana prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana alam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.10. Data Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana

No	Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah Barak pengungsian	19	19	19	19	19
2	Jumlah Bunker	2	2	2	2	2
3	Early Warning System	2	2	2	2	2
4	Relokasi rumah	241	-	72	-	-
5	Perlengkapan bunker	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket
6	Perlengkapan barak(genset)	1 unit	-	-	-	2 unit
7	Tenda Pleton	-	-	-	-	5 unit
8	Tenda kanfas	-	-	-	-	8 unit
9	Tenda besar Takol	-	-	-	-	25 unit
10	Peralatan SAR di kaliurang	1 Paket	-	-	-	-
11	Peralatan TRC	-	-	-	-	1 paket
12	Perahu karet	-	-	-	-	1 unit
13	Perlengkapan dapur	1 unit	-	-	-	-

Secara keseluruhan jumlah barak pengungsian di Kabupaten Sleman terfokus untuk mengantisipasi bencana Gunung Merapi dan sampai dengan tahun 2009 ini jumlah barak pengungsian ada 19 barak, 15 diantaranya merupakan peninggalan jaman Belanda. Pada tahun 2005 dilakukan rehab barak pengungsian di Merdikorejo, Wonokerto dan Banyurejo. Tahun 2006 dilakukan rehab barak pengungsian Bimomartani dan Hargobinangun, tahun 2007 dilakukan rehab barak pengungsian lumbungrejo dan Argomulyo, tahun 2008 dilakukan rehab barak pengungsian Glagahharjo.

Disamping pembangunan barak-barak pengungsian baik yang berupa pembangunan atau rehab barak, Pemerintah Kabupaten Sleman selama 5 tahun juga telah membuat jalan evakuasi bencana alam Gunung Merapi baik



yang berupa jalan pintas yang permanen atau jembatan sepanjang 122,9 km. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya bencana Gunung meletus dan untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sekitar Gunung Merapi.

Disamping itu telah menyediakan berbagai peralatan sebagai alat sistem peringatan dini bahaya Gunung Merapi baik yang berupa alat pengukur/sensor maupun alat transmisi informasi dengan bekerjasama dengan Kantor Telekomunikasi dan Telematika Kabupaten Sleman. Alat sistem peringatan dini bahaya Gunung Merapi ini meliputi sirine bahaya awan panas dan bahaya lahar dingin Gunung Merapi. Data perkembangan alat sistem peringatan dini bahaya Gunung Merapi dari tahun 2005 - 2006 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.11. Data Alat Sistem Peringatan Dini Bahaya Gunung Merapi

No	Tahun	Jenis Alat	Lokasi
1	2005	Transmitter, antena, Power Suply, Sirine	1. Tritis, Purwobinangun, Pakem 2. Kaliurang, Hargobinangun, Pakem 3. Telkom Kaliurang 4. Kalitengah Kidul, Glagaharjo, Cangkringan 5. Gumuk Bol, Umbulharjo, Cangkringan
2	2006	Transmitter, antena, Power Suply, Sirine	1. Posko Utama-Pakem, Hargobinangun, Pakem 2. Kepuhharjo, Cangkringan 3. Kaliadem, Cangkringan 4. Manggong, Glagaharjo, Cangkringan 5. Bronggang, Argomulyo, Cangkringan 6. Jambon Lor, Sindumartani, Ngemplak 7. Petit Opak, Kepuhharjo, Cangkringan 8. Klangon/Kalitengah Lor, Glagaharjo, Cangkringan

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kebijakan pelaksanaan bidang keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sleman pada tahun 2005-2009 adalah mengembangkan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan hukum serta mendorong terlaksananya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) dan mewujudkan stabilitas daerah yang bebas ancaman, hambatan dan gangguan dengan didukung oleh kesadaran swakarsa masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.



Implementasi atas kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai program yang dilakukan yaitu:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
2. Program Peningkatan Pelayanan Publik
3. Prgram Pembentukan Produk Hukum dan HAM
4. Program Pelayanan Bantuan Hukum
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6. Program Penegakan Hukum dan Peraturan Daerah
7. Program Pengembangan Budaya Politik, Etika Politik, dan Wawasan Kebangsaan
8. Program Peningkatan Kualitas Proses Politik
9. Program Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
10. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban
11. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman selama 5 tahun secara umum dapat dikatakan dalam kondisi yang aman dan tertib. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya jumlah berbagai forum kesatuan bangsa di kabupaten Sleman baik partai politik, organisasi kemasyarakatan baik yang berdasarkan profesi maupun agama serta lembaga swadaya masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kondisi yang kondusif di Kabupaten Sleman bagi tumbuh kembangnya berbagai organisasi kemasyarakatan, partai politik dan lembaga swadaya kemasyarakatan. Data jumlah partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12. Jumlah Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

No	Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Parpol daerah	24	24	24	38	38
2.	Organisasi Kemasyarakatan	49	49	49	66	88
3.	Jumlah LSM	30	47	47	61	72



Untuk melihat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat telah dilakukan berbagai kebijakan baik yang berupa pembinaan berbagai forum, orsosmas, PKL dan berbagai operasi untuk menjamin keamanan masyarakat. Hal itu dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.13. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

No	Jenis Kegiatan	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Forum wawasan kebangsaan	120	75	30	660	750
2.	Pembinaan Orsosmas/Orkesmas dan pemberdayaan perempuan	4	17	50	66	120
3.	Pengendalian pengamanan wilayah	64	24	65	87	100
4.	Pembinaan hansip	120	935	935	935	1035
5.	Pembinaan PKL	60	20	100	110	95
6.	Operasi miras, sajam, gepeng, WTS dan makanan kadaluarsa	33	21	23	47	19
7.	Pelayanan ijin HO	1.816	1.711	1.944	1.950	2.060

Pembinaan terhadap forum wawasan kebangsaan mengalami peningkatan yang pesat yaitu pada tahun 2005 sebanyak 120 orang dan pada tahun 2009 sebanyak 750 orang yang diberikan pembinaan wawasan kebangsaan sehingga ada kenaikan 16% diharapkan masyarakat semakin sadar akan arti pentingnya wawasan kebangsaan bagi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.

Pembinaan wawasan kebangsaan bagi orsosmas/orkesmas dan pemberdayaan perempuan juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebanyak 4 orsosmas dan pada tahun 2009 sebanyak 120 orsosmas yang telah diberikan pembinaan wawasan kebangsaan sehingga ada kenaikan 3,33% diharapkan orsosmas/orkesmas dapat lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada organisasinya.

Pengendalian pengamanan wilayah mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebanyak 64 buah dan pada tahun 2009 sebanyak 100 buah sehingga



ada kenaikan 64% diharapkan keamanan wilayah dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan tentram.

Pembinaan hansip desa dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebanyak 120 hansip dan pada tahun 2009 sebanyak 1.035 hansip sehingga ada kenaikan 11,59% diharapkan keamanan wilayah di desa dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan tentram.

Pembinaan PKL dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan karena jumlah PKL juga semakin meningkat dari tahun ketahun sehingga dengan adanya peningkatan pembinaan PKL diharapkan dapat mengurangi jumlah PKL di Kabupaten Sleman minimal PKL dapat terkoordinir di satu tempat. Peningkatan pembinaan PKL dapat dilihat dari tahun 2005 sebanyak 60 kali dan pada tahun 2009 sebanyak 95 kali sehingga ada kenaikan 63,16%

Pelayanan ijin HO mengalami kenaikan dari tahun 2005 sebanyak 1.816 buah dan pada tahun 2009 sebanyak 2.060 buah sehingga ada kenaikan sebesar 88,15%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sleman sudah sadar akan pentingnya pengajuan ijin HO untuk usahanya.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban

No	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
1.	2005	515.833.350,00	504.352.900	97,71%
2.	2006	957.645.000,00	933.506.900,00	97,5%
3.	2007	8.116.415.000,00	7.135.519.581,00	92,31%
4.	2008	734.550.000,00	723.035.925,00	98,43%
5.	2009	6.445.344.325,00	5.589.938.588,00	86,73%



Meskipun penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban berjalan dengan baik, namun sampai akhir tahun 2009 masih terdapat berbagai permasalahan antara lain adalah masih tingginya kasus-kasus tindakan kriminal dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sleman. Solusi yang telah dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antar aparat keamanan dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat.